

LAPORAN
RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2023



Kota Bima
Jl. Gajah mada No. 10 kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota
Bima
Nomor Tlpn : 0374-43214

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun Anggaran 2023 dapat Terselesaikan dengan baik. Laporan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2023 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan juga prakiraan maju tahun berikutnya. Dengan kata lain, dokumen ini memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Kota Bima Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, Juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Melalui Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi tolak ukur bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan laporan ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terimakasih atas sumbangan pikirannya.

Kota Bima, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Bima,



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

Tabel- Tabel iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja SKPD 25

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 25

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 34

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 36

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 42

BAB V. PENUTUP 63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.



Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2009 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kota bima
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2023 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
 - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
 - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2023, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja PD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen PD, Renstra PD,



dengan Renja K/L, dan Renja PD provinsi, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB V PENUTUP



BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang. (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Untuk dapat melihat Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan maka, dapat disajikan dengan tabel evaluasi Hasil RKPD tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibawah ini :



Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2021	REALISASI RKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Urusan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	98,20	98,20	ST
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	74,34	74,34	S
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100,00	98,45	98,45	ST
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100,00	97,05	97,05	ST
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100,00	0,00	0,00	SR
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100,00	99,71	99,71	ST
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100,00	95,49	95,49	ST
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100,00	95,66	95,66	ST
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kerjasama Investasi	1,00	95,66	9.566,00	ST
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1,00	98,41	9.841,00	ST
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2.000,00	98,41	4,92	SR
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100,00	99,72	99,72	ST
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	4,00	99,72	2.493,00	ST
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnyaJumlah Dokumen Realisasi Investasi	100,00	100,00	100,00	ST
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	1,00	100,00	10.000,00	ST

Ket : ST = Sangat Tinggi
T = Tinggi
S = Sedang
R = Rendah



2.1.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

Terkait Realisasi Program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, hampir pada program dan kegiatan tahun 2022 mencapai target keluaran yang diharapkan yakni diangka 96,01% realisasi pencapaian. Bisa dilihat pada program dan kegiatan dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	PERSENTAS E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
	DINAS PENANAMAN MODAL	3.950.264.438,00	3.792.740.156,00	157.524.282,00	96,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.312.620.538,00	3.186.510.796,00	126.109.742,00	96,19
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.674.400,00	45.641.400,00	33.000,00	99,93
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.767.600,00	6.767.600,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.419.200,00	2.419.200,00	-	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.246.000,00	7.246.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00	2.074.000,00	-	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.574.900,00	7.574.900,00	-	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.441.100,00	12.441.100,00	-	100,00
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.151.600,00	7.118.600,00	33.000,00	99,54
.	Administrasi Keuangan	2.776.988.698,00	2.657.875.816,00	119.112.882,00	95,71
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.604.398,00	2.546.491.516,00	104.112.882,00	96,07
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	122.400.000,00	107.400.000,00	15.000.000,00	87,75
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.548.300,00	1.548.300,00	-	100,00
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00	2.436.000,00	-	100,00



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

c.	Administrasi Umum	191.572.800,00	190.578.419,00	994.381,00	99,48
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	878.900,00	878.900,00	-	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.550.000,00	33.550.000,00	-	100,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.550.400,00	12.550.400,00	-	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.715.500,00	7.715.500,00	-	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.878.000,00	135.883.619,00	994.381,00	99,27
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.010.000,00	26.010.000,00	-	100,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.010.000,00	26.010.000,00	-	100,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.834.840,00	142.920.649,00	3.914.191,00	97,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.783.000,00	104.783.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.051.840,00	38.137.649,00	3.914.191,00	90,69
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.539.800,00	123.484.512,00	2.055.288,00	98,36
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.399.800,00	28.844.612,00	1.555.188,00	94,88
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000,00	7.510.000,00	-	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.630.000,00	87.129.900,00	500.100,00	99,43
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	-	0
g.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	-	-	0
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.514.000,00	35.514.000,00	-	100,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		35.514.000,00	35.514.000,00		100 -
h.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.514.000,00	35.514.000,00	-	100,00
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	162.155.500,00	157.464.160,00	4.691.340,00	97,11
2	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.155.500,00	157.464.160,00	4.691.340,00	97,11
3	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	110.663.000,00	106.090.500,00	4.572.500,00	95,87



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	20.530.000,00	20.530.000,00	-	100,00
4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	30.962.500,00	30.843.660,00	118.840,00	99,62
i.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	-	-	00
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	398.133.000,00	371.427.800,00	26.705.200,00	93,29
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	398.133.000,00	371.427.800,00	26.705.200,00	93,29
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	-	-	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		275.193.000,00	250.122.800,00	25.070.200,00	90,89
j.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	122.940.000,00	121.305.000,00	1.635.000,00	98,67
1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41.841.400,00	41.823.400,00	18.000,00	99,96



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86	87,12	Program Pelayanan penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	100%	130%	130 %
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 lembar izin	1952 Lembar Izin	130,33 %
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 kegiatan usaha	1222 kegiatan usaha	122 %
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	0	0	0
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya	30 orang	29 Orang	97 %



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

					terhadap Pelayanan Terpadu	Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	100%	100%
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10 % Rp. 143.521.006.828	130 % Rp. 186.220.708.499	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan nilai investasi	10 %	130 %	130 %
					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	114 %	114 %
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku usaha	240 pelaku usaha	114 %



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	231 %
--	--	--	--	--	--	---	-------------------	-------------------	-------

Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu dari target 30 orang tetapi yang terealisasi hanya 29 orang dengan capaian kinerja sebesar 97 %, hal ini terjadi karna tidaknya adanya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun keluhan terhadap masyarakat akan dampak kegiatan usaha.



2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Penyebab keberhasilan yang dominan sehingga kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima mencapai target yang ditentukan atau mengalami peningkatan adalah :

Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas penanaman modal dan PTSP dengan Dinas Teknis terkait;

Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;

Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;

Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;

Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022;

Penyesuaian Program dan kegiatan yang sesuai dengan Kepemdagri 50 tahun 2022

Penyelerasan anatara nama program dan kegiatan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang

Target kinerja pada indikantor sasaran atau indikator utama akan dipegaruhi oleh keadaan realisasi anggaran yang ada karena kegittannya dipengaruhi oleh situasi pandemi yang dirasakan sekarang, yakni aadanya pandemi covid-19

Penganggaran yang tidak sangat kurang atau minum untuk memajukan saranan dan prasana terkait peningkatan pelayanan publik

Masih belum adanya aplikasi daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik

Terkait kegiatan IKM masih dilakukan secara manual, yang diingkan bisa menggunakan aplikasi mandiri atau sistem IKM online untuk masyarakat yang merasakan akan pelayanan pada DPMPTSP

Belum bisa dikatanan PTSP sebagai pelayanan satu pintu karena dinas terkait atau teknis belum ada yang berkantor ke DPMPTSP.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut



Melakukan sosialisai kepada pelaku usaha (Badan/perorangan) tentang aturan – aturan yang berkaitan dengan Perizinan;

Melakukan Pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha (Badan/perorangan) yang akan berakhir masa berlaku izinnya;

Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan;

Melakukan rapat- rapat koordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam hal kepengurusan pelayanan perijinan satu pintu.

Diharapkan bisa diberikan anggaran dan dana yang sesuai untuk saranan dan prasarana untuk meningkatkannya pelayanan publik;

Semoga pandemi covid-19 segera berlalu agar roda perekonomian khususnya dikota bima akan pulih kembali.



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode Pelaksanaan: Tahun 2022

(Anggaran Dalam Juta Rupiah)																												
NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%			16
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	2.18	Bidang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																										
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase	0,00	3.522	0,00	460	100,00	3.162	14,86	470	23,51	981	0,00	705	0,00	1.023	38,37	3.179	38,37	100,54	38,37	3.639	0,00	103,31	BIDANG SEKRETARIAT	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase	0,00	80	0,00	20	100,00	48	23,14	11	15,31	7	0,00	1	0,00	26	38,45	46	38,45	95,48	38,45	65	0,00	81,43		
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	2,00	17	100,00	4	2,00	7	45,02	3	54,98	4	0,00	0	0,00	0	100,00	7	5.000,00	100,00	200,00	11	10.000,00	64,84		
	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1,00	9	100,00	2	1,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2	10.000,00	100,00	200,00	4	20.000,00	47,77		
	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah dokumen RKA-P	Dokumen	1,00	10	100,00	2	1,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	7	100,00	7	10.000,00	361,04	200,00	9	20.000,00	92,84		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SKPD																										
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1,00	4	100,00	2	1,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2	10.000,00	100,00	200,00	4	20.000,00	100,64		
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-P	Dokumen	1,00	3	100,00	3	1,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	8	100,00	8	10.000,00	283,92	200,00	10	20.000,00	323,29		
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	2,00	11	100,00	2	2,00	2	0,00	0	0,00	0	49,11	1	91,14	11	140,25	12	7.012,50	554,07	240,25	15	12.012,50	131,47		
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Dokumen	2,00	26	39,88	4	2,00	30	11,88	4	12,15	4	0,00	0	0,00	0	24,03	7	1.201,50	24,03	63,91	12	3.195,50	45,17		
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	persentase	0,00	2.780	0,00	155	100,00	2.694	15,30	412	25,74	896	0,00	599	0,00	751	41,04	2.658	41,04	98,65	41,04	2.813	0,00	101,17		
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	orang	50,00	2.658	98,66	35	50,00	2.568	15,26	392	33,85	869	22,21	570	26,99	715	98,31	2.546	196,62	99,17	196,97	2.581	393,94	97,12		
	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	bulan	12,00	108	93,94	116	12,00	122	14,62	18	21,94	27	21,94	27	29,25	36	87,75	107	731,25	87,75	181,69	224	1.514,08	206,65		
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1,00	9	100,00	2	1,00	2	100,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2	10.000,00	100,00	200,00	5	20.000,00	57,11		
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	dokumen	1,00	6	100,00	2	1,00	2	0,00	0	0,00	0	100,00	2	0,00	0	100,00	2	10.000,00	100,00	200,00	3	20.000,00	52,88		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
								I		II		III		IV														
								8		9		10		11									12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12	
1	2	3	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	semesteran																									
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	persentase	0,00	213	0,00	119	100,00	119	12,74	15	14,89	36	0,00	39	0,00	93	27,63	183	27,63	154,13	27,63	302	0,00	141,97		
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	persentase	100,00	2	100,00	1	100,00	1	0,00	0	100,00	1	0,00	0	0,00	0	100,00	1	100,00	100,00	200,00	2	200,00	78,79		
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	12,00	32	99,98	36	12,00	27	24,54	7	19,80	5	28,86	8	41,49	14	114,69	34	955,75	125,08	214,67	69	1.788,92	215,84		
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	persentase	100,00	18	100,00	15	100,00	10	10,81	1	41,65	4	14,76	1	48,65	6	115,87	13	115,87	130,91	215,87	27	215,87	150,08		
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	51,00	160	95,17	68	51,00	81	9,22	7	31,96	26	36,38	30	53,18	73	130,74	136	256,35	167,02	225,91	203	442,96	127,05		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
							I		II		III		IV															
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	persentase	0,00	43	0,00	0	100,00	29	0,00	0	0,00	0	0,00	26	0,00	0	0,00	26	0,00	89,50	0,00	26	0,00	61,10		
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	unit	4,00	43	0,00	0	2,00	29	0,00	0	0,00	0	89,50	26	0,00	0	89,50	26	4.475,00	89,50	89,50	26	2.237,50	61,10		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	persentase	0,00	147	0,00	138	100,00	153	17,46	27	13,59	36	0,00	32	0,00	49	31,05	143	31,05	93,41	31,05	281	0,00	191,12		
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	surat	2.300,00	105	100,00	102	2.300,00	105	16,61	17	25,27	26	24,91	26	33,21	35	100,00	105	4,35	100,00	200,00	207	8,70	197,69		
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12,00	42	98,86	35	12,00	48	19,33	9	18,91	9	12,42	6	32,61	14	83,27	38	693,92	79,10	182,13	73	1.517,75	174,76		
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	persentase	0,00	260	0,00	29	100,00	119	4,08	5	3,47	6	0,00	8	0,00	104	7,55	123	7,55	103,68	7,55	152	0,00	58,59		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
									I		II		III		IV					K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang layak	unit	4,00	53	95,04	26	4,00	30	16,34	5	18,94	6	24,46	7	36,48	11	96,22	29	2.405,50	97,04	191,26	55	4.781,50	103,52		
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	unit	10,00	7	100,00	3	10,00	3	0,00	0	26,45	1	25,00	1	81,09	6	132,54	8	1.325,40	272,10	232,54	10	2.325,40	150,59		
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	persentase	100,00	200	0,00	0	30,00	87	0,00	0	0,00	0	0,00	0	99,43	87	99,43	87	331,43	100,59	99,43	87	99,43	43,57		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,29	105,81			0,00	105,90		
Predikat Kinerja																					SR	ST			SR	ST		
2.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	hari	1,00	160	98,40	128	1,00	130	14,75	19	26,89	35	25,29	33	43,38	70	110,31	157	11.031,00	120,96	208,71	286	20.871,00	178,27	BIDANG PTSP	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	lembar	2.000,00	160	98,40	128	2.000,00	130	14,75	19	26,89	35	25,29	33	43,38	70	110,31	157	5,52	120,96	208,71	286	10,44	178,27		
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	lembar	2.000,00	116	99,47	85	2.000,00	86	17,03	15	35,03	30	19,30	17	40,61	45	111,97	106	5,60	123,82	211,44	191	10,57	165,38		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																										
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	ijin usaha	1.500,00	14	100,00	14	1.500,00	14	15,62	2	26,09	4	32,27	5	48,81	10	122,79	21	8,19	144,52	222,79	35	14,85	244,52		
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	persentase	100,00	30	94,62	29	100,00	30	7,88	2	4,24	1	38,93	12	49,67	15	100,72	31	100,72	101,81	195,34	60	195,34	196,42		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					5,52	120,96			10,44	178,27		
Predikat Kinerja																					SR	ST			SR	ST		
3.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	persentase	0,00	357	0,00	297	100,00	398	2,96	12	15,50	97	0,00	83	0,00	180	18,46	371	18,46	93,29	18,46	668	0,00	186,89	BIDANG PM	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	kegiatan	0,00	357	0,00	297	4,00	398	2,96	12	15,50	97	0,00	83	0,00	180	18,46	371	461,50	93,29	18,46	668	0,00	186,89		
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Realisasi Investasi melalui OSS dan LKPM	kegiatan	7,00	234	100,00	202	7,00	275	1,62	4	24,22	67	14,46	40	50,60	139	90,90	250	1.298,57	90,89	190,90	452	2.727,14	192,88		



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen hasil BAP Pengawasan	kegiatan	4,00	123	99,98	94	4,00	123	5,98	7	25,00	31	34,94	43	32,75	40	98,67	121	2.466,75	98,67	198,65	216	4.966,25	175,47		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					461,50	93,29			0,00	186,89		
Predikat Kinerja																					ST	ST			SR	ST		
4.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnyaJumlah Dokumen Realisasi Investasi	persentase	0,00	42	0,00	15	100,00	42	8,98	4	0,00	0	0,00	18	0,00	20	8,98	42	8,98	99,96	8,98	57	0,00	135,99	BIDANG PM	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	dokumen	0,00	42	0,00	15	1,00	42	8,98	4	0,00	0	0,00	18	0,00	20	8,98	42	898,00	99,96	8,98	57	0,00	135,99		
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	dokumen	4,00	42	100,00	15	1,00	42	8,98	4	0,00	0	43,19	18	47,78	20	99,95	42	9.995,00	99,96	199,95	57	4.998,75	135,99		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					898,00	99,96			0,00	135,99		
Predikat Kinerja																					ST	ST			SR	ST		
5.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Porsentase	Dokumen	0,00	0	0,00	0	1,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	30	0,00	36	0,00	100,00	0,00	36	0,00	0,00	BIDANG PM	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		IKLIM PENANAMAN MODAL	peningkatan nilai investasi																									
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi Investasi	Dokumen	0,00	0	0,00	0	1,00	36	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	30	0,00	36	0,00	100,00	0,00	36	0,00	0,00		
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	Dokumen	0,00	0	0,00	0	1,00	36	0,00	0	0,00	0	14,22	5	85,78	30	100,00	36	10.000,00	100,00	100,00	36	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	100,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																				SR	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										3.767		505		1.114		843		1.323		3.785								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																				151,07	104,91			10,44	126,28			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																				ST	ST			SR	ST			



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (DPMPTSP)

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman modal dan PTSP
KOTA bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86	80,9	90,32	70,5	87,12		103	112	83	98	
		Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	Rupiah	135.243.050.211	137.947.911.215	140.706.869.439	143.521.006.828	188.071.397.742	215.232.484.278	290.335.385.400	115.380.536.100	186.220.708.499		159	210	82	130	



2.2. Analisis Kinerja SKPD

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2018 sampai tahun 2023, dan sebagian lagi akan dilaksanakan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 6 Program dan 11 kegiatan tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian sasaran sebesar 96,01 % atau ketidaktercapiannya hanya sebesar 4 %.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPSTP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan



12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merupakan suatu indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya Rancangan program awal di tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah berhasil melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dengan capaian sasaran sebesar 96,01 % atau ketidakcapaian hanya sebesar 4 %.

1. Akuntabilitas Penerimaan Daerah

Sebagai SKPD yang bertugas melayani perizinan yang terpusat Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani semua perizinan yang sebelumnya ditangani oleh masing –masing Dinas terkait.

2. Akuntabilitas Pengeluaran SKPD

Selama tahun 2022 Anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.950.264.438,00- dengan realisasi sebesar Rp. 3.792.740.156,00- atau 96,01 %.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan yang lazim dengan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, secara efektif dan efisien serta mengusahakan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan



Tabel. 2.4

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2022	REALISASI RKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Urusan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	38,37	38,37	SR
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	38,45	38,45	SR
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100,00	41,04	41,04	SR
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100,00	27,63	27,63	SR
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100,00	0,00	0,00	SR
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100,00	31,05	31,05	SR
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100,00	7,55	7,55	SR
2.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1,00	110,31	11.031,00	ST
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Jumlah izin usaha dan non usaha yang	2.000,00	110,31	5,52	SR



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2022	REALISASI RKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>di terbitkan</i>				
3.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100,00	18,46	18,46	SR
	2.18.05.2.01	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)</i>	4,00	18,46	461,50	ST
4.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnyaJumlah Dokumen Realisasi Investasi	100,00	8,98	8,98	SR
	2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Realisasi Investasi</i>	1,00	8,98	898,00	ST
5.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan nilai investasi	1,00	0,00	0,00	SR
	2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Peta potensi Investasi</i>	1,00	0,00	0,00	SR

Sub bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Sajikan hasil pengerjaan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :



Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Bima

Nama PD : Dinas Penanaman modal dan PTSP kota bima

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	
(2)		(3)				(4)	(5)		(6)	(8)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.956.627.279,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									3.956.627.279,00	
DINAS PENANAMAN MODAL									3.956.627.279,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100%	3.041.598.132,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bima	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100%	3.333.888.479,00	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	26.305.400,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.905.400,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	4.127.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	4.127.000,00	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1.957.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1.957.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA-P	1 dokumen	2.007.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen RKA-P	1 dokumen	2.007.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	2.074.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	2.074.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA-P	1 dokumen	2.668.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah dokumen DPA-P	1 dokumen	1.918.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	2 dokumen	2.244.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	2 dokumen	1.344.400,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	2 dokumen	11.228.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	2 dokumen	4.478.000,00	
Administrasi Keuangan	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100%	2.723.505.177,00	Administrasi Keuangan	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100%	2.953.764.624,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	50 orang	2.595.788.877,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	50 orang	2.827.380.324,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	12 bulan	123.732.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	12 bulan	122.400.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1.548.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1.548.300,00	
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2.436.000,00	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2.436.000,00	
Administrasi Umum	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	123.612.815,00	Administrasi Umum	Kota Bima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100%	176.309.215,00	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	826.100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	1.753.100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	35.942.315,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	25.942.315,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	100%	14.746.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	100%	10.746.400,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 media	1.110.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 media	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kali	70.988.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kali	137.867.400,00	
				0,00						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100%	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100%	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	2 unit	138.142.940,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	2 unit	0,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	102.383.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100%	155.877.440,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	2300 surat	35.759.940,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	2300 surat	102.383.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.031.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	53.494.440,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	27.271.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100%	30.031.800,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas yang layak	4 unit	2.760.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah kendaraan dinas yang layak	4 unit	27.271.800,00	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	10 unit	0,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	10 unit	2.760.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	30%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	30%	0,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Bima	porsentase peningkatan nilai investasi	100%	41.693.800,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Bima	porsentase peningkatan nilai investasi	100%	42.180.000,00	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah peta potensi investasi	1 Kegiatan	41.693.800,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah peta potensi investasi	1 Kegiatan	42.180.000,00	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Peta Potensi	1 kegiatan	41.693.800,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Peta Potensi	1 kegiatan	42.180.000,00	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100%	130.183.500,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100%	41.693.800,00	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah promosi penanaman modal	1 Kegiatan	130.183.500,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah promosi penanaman modal	1 Kegiatan	41.693.800,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 kegiatan	85.681.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 kegiatan	41.693.800,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1 Hari	14.206.000,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1 Hari	179.977.000,00	
Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2000 lembar	30.296.500,00	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2000 lembar	179.977.000,00	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2000 lembar		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2000 lembar	87.681.000,00	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 ijin usaha	0,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 ijin usaha	14.206.000,00	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	365.406.400,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Bima	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	63.175.000,00	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

	Kota Bima	Jumlah Survey IKM	4 Dokumen	365.406.400,00		Kota Bima	Jumlah Survey IKM	4 Dokumen		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bima	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	4 kali	68.813.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bima	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	4 kali	14.915.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	100%	202.153.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	100%	343.813.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal	50 dokumen	94.440.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Kota Bima	jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal	50 dokumen	343.813.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen LKPM	50 dokumen	15.075.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen LKPM	50 dokumen	47.220.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah perusahaan yang didampingi	50 perusahaan	15.075.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	Jumlah perusahaan yang didampingi	50 perusahaan	202.153.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen hasil BAP pengawasan	50 perusahaan	15.075.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bima	jumlah dokumen hasil BAP pengawasan	50 perusahaan	94.440.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan capaian realisasi investasi	100%	15.075.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Porsentase peningkatan capaian realisasi investasi	100%	15.075.000,00	
Pengelolaan Data dan Informasi Perinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Nilai Investasi	1 dokumen	15.075.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Nilai Investasi	1 dokumen	15.075.000,00	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi investasi	1 dokumen	15.075.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bima	Jumlah Dokumen Realisasi investasi	1 dokumen	15.075.000,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Program Usulan

Program Usulan kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan tahun yang akan datang untuk melaksanakan suatu rencana. Adapun Program Usulan yang akan dilaksanakan Sesuai dengan Kepmendagri 50 tahun 2020 adalah :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dari Program Usulan tersebut Program yang merupakan media untuk Peningkatan pemahaman SKPD untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individual maupun peningkatan dinas umumnya, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

2.5.2. Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal
- b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

sub kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dari kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Penanaman Modal, maka dengan adanya penambahan suatu kegiatan baru akan memberikan suatu kontribusi yang sangat baik untuk menunjang suatu kegiatan program.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman modal dan PTSP kota Bima Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,86
	2. Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10% 188.071.397,742

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

3.2.1. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.



2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Menjamin komitmen terhadap kesempatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan
- c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi faktor internal yaitu :

❖ **Kekuatan (Strength) :**

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- d. Peta Potensi investasi
- e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP

❖ **Kelemahan (Weakness) :**

- a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

❖ **Peluang (Opportunities)**

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS



- d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan
- e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

❖ **Ancaman (Threats)**

- a. Adanya pengaduan masalah perijinan
- b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksesuaian kepemilikan perijinan
- e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	10 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Layanan)	76,86	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86
					Meningkatnya Investasi Daerah (Realisasi Investasi)	10%	10 % 135.243.050.211	10 % 137.947.911.215	10 % 140.706.869.439	10 % 143.521.006.828	10 % 188.071.397.742



Bahwa pada sub bagian ini berisi Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.3
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektifitas pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Jumlah Dokumen Izin Usaha dan Non Usaha yang telah diterbitkan
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi	% Peningkatan capaian realisasi investasi	terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi
3.	PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya penerima fasilitas insentif	Porsentase peningkatan nilai investasi	tersusunnya dokumen penetapan kebijakan daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah
4.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kerjasama investasi	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Terlaksananya Penyusunan Strategi promosi Penanaman Modal	jumlah dokumen startegi promosi
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	% peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :



Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan ptsp kota bima

No	Tujuan dan Sasaran Dinas penanaman modal dan PTSP	Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Target Kinerja
			Tujuan dan Sasaran Tahun 2022
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		
1.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	85
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi		

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman modal dan PTSP

NO.	IKU	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA IKU
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yaitu meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Kota Bima yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman modal
Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Penyelesaian Perizinan Sesuai Standar Pelayanan diantaranya dengan pengembangan Gerai Pelayanan Perizinan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan sebesar 92%.
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan diarahkan pada penanganan pengaduan serta peningkatan prasarana sarana layanan., melalui penyelesaian pengaduan masyarakat dan analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebesar 100% dan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan sebesar 90%.
3. PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL
Kegiatan diarahkan pada penerbitan regulasi yang tepat untuk penanaman modal sehingga mengharapkan tersusunya dokumen kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan persentase pemenuhan 100%
4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kegiatan diarahkan pada kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal

diantaranya melalui Kemitraan Antar Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM, serta Pameran Investasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Jumlah Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional terhadap jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 21% dan Rasio Jumlah Realisasi Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah Kepeminatan Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM sebesar 23%.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan diarahkan pada pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan

evaluasi, antar lain melalui Pemantauan Perusahaan, dan Penyelesaian Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Realisasi Proyek Penanaman Modal di Kota Bima sebesar 15%.

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program

dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2022 serta

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
 - b. Prioritas pembangunan
 - c. Pencapaian SDGs;
 - d. Pengurangan kemiskinan;
 - e. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
 - f. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
 - g. Pencapaian IKU
 - h. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
 - i. Pengembangan wilayah miskin;

- j. Dan sebagainya, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran dan Program/Kegiatan

NO	Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PROGRAM/KEGIATAN
(1)		(2)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		DINAS PENANAMAN MODAL
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Jumlah dokumen RKA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Jumlah dokumen RKA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Jumlah dokumen DPA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Jumlah dokumen DPA-P	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Administrasi Keuangan
1	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3	Jumlah laporan keuangan semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD



4	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Administrasi Umum
1	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d.	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
f.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Porsentase peningkatan nilai investasi	B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
g.	Jumlah Peta potensi Investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1	Jumlah Peta potensi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota



	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
h.	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
3	persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
4	Jumlah Survey IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
i.	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota
1	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3	Peningkatan Realisasi Investasi melalui OSS dan LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	Jumlah Dokumen hasil BAP Pengawasan	E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
j.	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnya	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota
1	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- 3) Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- 4) Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :
 1. Pendidikan dan kesehatan
 2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
 3. Ekonomi dan Pariwisata
 4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
 5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
 6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 7. disajikan dalam table sebagai berikut :
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Tabel 3.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Alokasi Dana APBD		Keterangan		
										Hasil Program		Keluaran kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Perkiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	SKPD 01/02/ 03	Jenis Kegiatan a/b
										Tolak Ukur	Tar get	Tolak Ukur	Tar get	Tolak Ukur	Tar get					
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1	0.0.0				DINAS PENANAMAN MODAL														
2	1	0.0.0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Kota Bima							3.950.264.438	4.147.777.660	DAU	Sekretariat	B
2	1	0.0.0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bima							45.674.400,00	47.958.120	DAU		B
2	1	0.0.0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bima							6.767.600,00	7.105.980	DAU		B
2	1	0.0.0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Bima							2.419.200,00	2.540.160	DAU		B
2	1	0.0.0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-			Kota Bima							7.246.000,00	7.608.300	DAU		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

						SKPD														
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD			Kota Bima							2.074.0 00,00	2.177 .700	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			Kota Bima							7.574.9 00,00	7.953 .645	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bima							12.441. 100,00	13.06 3.155	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bima							7.151.6 00,00	7.509 .180	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 2		Administrasi Keuangan			Kota Bima							2.776.9 88.698, 00	2.915 .838. 133	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bima							2.650.6 04.398	2.783 .134. 618	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			Kota Bima							122.40 0.000,0 0	128.5 20.00 0	DAU		B
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 1	2. 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan/Semester an SKPD			Kota Bima							1.548.3 00,00	1.625 .715	DAU		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bima							2.436.0 00,00	2.557 .800	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06		Administrasi Umum			Kota Bima							191.57 2.800,0 0	201.1 51.44 0	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bima							878.90 0,00	922.8 45	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bima							33.550. 000,00	35.22 7.500	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Bima							12.550. 400,00	13.17 7.920	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Kota Bima							7.715.5 00,00	8.101 .275	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Bima							136.87 8.000,0 0	143.7 21.90 0	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Bima							26.010. 000,00	27.31 0.500	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bima							26.010. 000,00	27.31 0.500	DAU		B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.0 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			Kota Bima							146.83 4.840,0 0	154.1 76.58	DAU		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

						Daerah											2			
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bima								104.78 3.000,00	110.0 22.150	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Bima								42.051. 840,00	44.15 4.432	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bima								125.53 9.800,00	131.8 16.790	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Bima								30.399. 800,00	31.91 9.790	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bima								7.510.0 00,00	7.885 .500	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bima								87.630. 000,00	92.01 1.500	DAU	B
2	18	0.0. 0.0. 1	03			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGR AM PENGE MBANG AN IKLIM PENANA	Menin gkatny a peneri ma fasilita s	Kota Bima	Porsent ase peningk atan nilai investa si	%	Juml ah Nilai Inves tasi	Nilai (Rp)	Jumlah Peratur an Daerah /Provin si dalam	Dok ume n	35.514. 000,00	37.28 9.700	DAU	Bidan g PM	B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

							MAN MODAL	insenti f					Pembe rian Fasilita s/Insen tif dan Kemud ahan Penan aman Modal							
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 3	2. 0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bima			Juml ah Nilai Inves tasi	Nilai (Rp)	Jumlah Peratur an Daerah (Perda) Rencan a Umum Penana man Modal Daerah Kabupat en/Kota	Dok ume n	0	-	DAU		B
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kota Bima					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanama n Modal Daerah Kabupaten /Kota	Dok ume n	0	-	DAU		B
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kota Bima					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperole h Insentif dan Kemudaha n Berusaha di daerah	Kegi atan	0	-	DAU		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Kota Bima			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bima					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerahkab/kota	Dokumen	0	-	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kota Bima					Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	35.514.000,00	37.289.700	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan kerjasama investasi	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	orang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	-	DAU	Bidang PM	B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bima			Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	orang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal								Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bima					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi penanaman modal kab/kota	Dokumen	0	-	DAU		B
2	18	0.0.0.0.1	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Penanaman Modal	Kota Bima	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	orang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	15000 jenis izin	162.155.500,00	170.263.275	DAU	Bidang PTSP	B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

														Secara Elektronik							
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01		Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bima			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	orang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15000 jenis izin	162.155.500,00	170.263.275	DAU		B	
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kota Bima					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15000 jenis izin	110.663.000,00	116.196.150	DAU		B	



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0. 0.0. 1	04	2. 01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				Kota Bima				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemanfaatan Pemen- uhan Komit- men Perizin- an Berusa- ha dan Non Perizin- an Penan- aman Modal	1000 kegiatan usa- ha	20.530.000,00	21.556.500	DAU	B
---	----	-------------------	----	----------	----	--	--	--	--	-----------	--	--	--	---	-----------------------	---------------	------------	-----	---



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Kota Bima				Jumlah Orang yang Mempe roleh Layana n Konsult asi dan Terkelo lany a Penga duan Masyar akat Terhad ap Pelaya nan Terpad u perizin ana don non perizin an	30 Ora ng	30.962.500,00	32.510.625	DAU	B
---	----	-----------	----	------	----	--	--	-----------	--	--	--	---	-----------	---------------	------------	-----	---



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Kota Bima				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	kegiatan usaha	0	-	DAU		B	
2	18	0.0.0.0.1	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Realisasi Investasi	Kota Bima	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melakukan Kegiatan Penanaman Modal	orang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	398.133.000,00	418.039.650	DAK	Bidang PM	B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota			Kota Bima			Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melakukan Kegiatan Penanaman Modal (LKP M)	orang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	398.133.000,00	418.039.650	DAK		B
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kota Bima					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 kegiatan usaha	0,00	-	DAK		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kota Bima					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 pelaku usaha	275.193.000,00	288.952.650	DAK		B
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kota Bima					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13 Kegiatan usaha	122.940.000,00	129.087.000	DAK		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	18	0.0.0.0.1	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGR AM PENGE LOAAN DATA DAN SISTEM INFORM ASI PENANA MAN MODAL	Menin gkatny a Realis asi Usaha yang berizin	Kota Bima	Persentas e Peningkat an Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana n Perizinan Berusaha Terintegr asi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaa tkan	100 %	Jumlah Data dan Inform asi Perizin an dan Non Perizin an Berbas is Sistem Pelaya nan Perizin an Berusa ha Terinte grasi Secara Elektro nik yang Diolah, Dikaji dan Dimanf aatkan	Dok ume n	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana n Perizinan Berusaha Terintegr asi Secara Elektroni k yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaa tkan	Dok ume n	41.841. 400,00	43.93 3.470	DAU	Bidan g PM	B
2	18	0.0.0.0.1	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perinaan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota			Kota Bima			Jumlah Data dan Inform asi Perizin an dan Non Perizin an Berbas is Sistem Pelaya nan Perizin an Berusa ha Terinte grasi	Dok ume n	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana n Perizinan Berusaha Terintegr asi Secara Elektroni k yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaa	Dok ume n	41.841. 400,00	43.93 3.470	DAU		B



Laporan Renja 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

												Secara Elektro nik yang Diolah, Dikaji dan Dimanf aatkan		tkan							
2	1 8	0.0. 0.0. 1	0 6	2. 0 1	0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kota Bima					Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana n Perizinan Berusaha Terintegr asi Secara Elektroni k yang Diolah, Dikaji dan Dimanf atkan	Dok ume n	41.841. 400,00	43.93 3.470	DAU		B	



BAB. V

P E N U T U P

Sebagai uraian terakhir pada bab penutup Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2023 ini, disampaikan dengan kaidah pelaksanaan rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Daerah Pemerintah daerah Kota Bima (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Dengan ditetapkannya Renja DPMPTSP Kota Bima ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkup DPMPTSP Kota Bima terikat untuk menjadikannya acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2023 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2023 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan Renja ini.

Raba-Bima, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bima,



H. Laili Sukarsana, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 1196607041986081003